

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional karena keberhasilan pembangunan di tingkat daerah akan sangat menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan karakteristik wilayahnya. Kewenangan tersebut menuntut daerah untuk mampu mengelola sumber daya lokal secara optimal agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan (Suryono, 2019).

Pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari peran sektor usaha kecil dan menengah yang tersebar di wilayah setempat. Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi lokal karena mampu menyerap tenaga kerja, mendorong perputaran ekonomi masyarakat, dan menghasilkan berbagai produk berbasis potensi daerah. UMKM juga sering menjadi sektor yang relatif tangguh dalam menghadapi perubahan ekonomi karena karakter usahanya lebih fleksibel dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengembangan UMKM perlu

terus didukung melalui kebijakan yang mendorong akses permodalan, legalitas usaha, pendampingan, promosi, dan perluasan pasar (Tambunan, 2021).

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, kegiatan ekspor memiliki peran yang sangat penting untuk memperluas jangkauan pasar produk lokal. Ekspor membuka peluang bagi produk daerah untuk dikenal di pasar yang lebih luas, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperkuat reputasi daerah dalam perdagangan yang kompetitif. Pemerintah terus mendorong UMKM agar berorientasi ekspor melalui berbagai fasilitas, termasuk pembinaan, kemudahan usaha, dan promosi dagang. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa UMKM ditempatkan sebagai bagian penting dalam penguatan ekonomi berbasis daya saing (Hasan, 2020).

Secara normatif, pengembangan daerah dan pemberdayaan UMKM memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberdayakan UMKM, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan daya saing daerah (Republik Indonesia, 2021).

Selain itu, penguatan promosi dagang juga didukung oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Kemudahan, dan Keikutsertaan pada Promosi Dagang dalam Rangka Kegiatan Pencitraan Indonesia. Peraturan ini menunjukkan bahwa promosi dagang bukan

hanya kepentingan pusat, tetapi juga harus diimplementasikan sampai ke tingkat daerah agar produk unggulan lokal memperoleh akses pasar yang lebih luas (Kementerian Perdagangan, 2025).

Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah di Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor non-migas. Meskipun daerah ini dikenal memiliki sumber daya migas, ketergantungan pada sektor tersebut tidak dapat dijadikan tumpuan utama pembangunan jangka panjang karena sifatnya terbatas. Oleh sebab itu, penguatan sektor non-migas menjadi sangat penting agar struktur ekonomi daerah lebih stabil dan berkelanjutan (Bappeda Kabupaten Bojonegoro, 2023).

Kabupaten Bojonegoro juga memiliki berbagai produk unggulan lokal, seperti hasil olahan, kerajinan, dan produk UMKM yang berpotensi untuk dipromosikan ke pasar yang lebih luas. Potensi tersebut akan menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar apabila didukung oleh kebijakan yang tepat, promosi yang berkelanjutan, dan yang strategis. Dalam kondisi seperti ini, peran perangkat daerah menjadi sangat penting karena merekalah yang secara langsung merancang dan menjalankan program pengembangan ekonomi lokal (Prasetyo & Utama, 2022).

Dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi daerah tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro memegang peranan penting. Berdasarkan uraian tugas dan fungsi dinas, perangkat daerah ini membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, dan usaha mikro. Artinya, dinas ini mempunyai tanggung jawab untuk

mendorong penguatan pelaku usaha, memfasilitasi perdagangan, serta mengembangkan UMKM agar mampu naik kelas (Bupati Bojonegoro, 2021).

Salah satu bidang yang langsung berkaitan dengan pengembangan produk lokal adalah Bidang Promosi Ekspor dan Kerjasama. Bidang ini bertugas memfasilitasi promosi produk daerah, membangun jejaring kerja sama, dan membantu pelaku UMKM agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Keberadaan bidang ini menjadi sangat penting karena keberhasilan promosi ekspor tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga pada kemampuan organisasi pemerintah dalam mengelola sumber daya, menjalin koordinasi, dan memberikan dukungan yang tepat kepada pelaku usaha (Kotler & Keller, 2016).

Secara ideal, Bidang Promosi Ekspor dan Kerjasama harus mampu menjadi penghubung antara potensi lokal dan peluang pasar yang lebih besar. Bidang ini tidak hanya menjalankan fungsi promosi secara formal, tetapi juga harus aktif membangun hubungan dengan pelaku UMKM, mitra usaha, dan pihak-pihak yang dapat membuka akses pasar. Untuk menjalankan fungsi tersebut, dibutuhkan sumber daya yang memadai, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, maupun dukungan kebijakan. Jika sumber daya tersebut tidak memadai, maka pelaksanaan program promosi dan akan sulit berjalan secara optimal (Sedarmayanti, 2017).

Menurut Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga, Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN*, evaluasi kinerja sektor publik perlu dilakukan secara menyeluruh melalui dimensi input, process, output, dan outcome. Pemahaman ini penting karena kinerja organisasi publik tidak cukup dinilai dari hasil akhirnya saja, tetapi juga dari sumber daya yang

digunakan, proses kerja yang dijalankan, hasil langsung yang dicapai, dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Dalam buku *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Mahmudi menjelaskan bahwa pendekatan kinerja berbasis hasil harus melihat efisiensi, efektivitas, dan manfaat publik secara utuh (Mahmudi, 2019).

Dimensi input dalam berkaitan dengan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan kegiatan organisasi, seperti jumlah pegawai, kompetensi pegawai, anggaran, dan fasilitas kerja. Dalam penelitian ini, dimensi input menjadi penting karena pelaksanaan promosi ekspor sangat tergantung pada ketersediaan anggaran promosi, kesiapan sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendukung. Jika input tidak memadai, maka proses pelaksanaan program akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Dimensi process menurut Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN* menekankan pada efektivitas cara kerja, koordinasi, pengendalian, dan pelaksanaan program. Pada konteks penelitian ini, process berkaitan dengan bagaimana Bidang Promosi Ekspor dan Kerjasama menjalankan kegiatan promosi, membangun koordinasi dengan pelaku UMKM, serta mengatur mekanisme kerja sama. Jika proses berjalan kurang efektif, maka hasil yang dicapai juga cenderung tidak maksimal.

Dimensi output menggambarkan hasil langsung yang diperoleh dari kegiatan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, output dapat berupa jumlah UMKM yang difasilitasi, kegiatan promosi yang terlaksana, kerja sama yang dibangun, atau partisipasi pelaku usaha dalam program tertentu. Output penting

untuk melihat sejauh mana kegiatan yang direncanakan benar-benar dilaksanakan oleh bidang terkait.

Dimensi outcome menunjukkan dampak jangka panjang dari kegiatan organisasi terhadap sasaran yang dituju. Dalam penelitian ini, outcome berkaitan dengan peningkatan daya saing UMKM, perluasan pasar produk lokal, peningkatan ekspor non-migas, dan keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah. Oleh karena itu, outcome menjadi ukuran yang paling penting untuk menilai apakah kegiatan promosi ekspor dan kerja sama benar-benar memberi manfaat bagi daerah.

Berdasarkan data yang terdapat dalam dokumen penelitian, target dan realisasi ekspor non-migas Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 sampai dengan 2024 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 target ekspor sebesar 100, tetapi realisasi hanya 82. Pada tahun 2022 target meningkat menjadi 110, namun realisasi baru mencapai 91. Tahun 2023 target sebesar 120 dengan realisasi 103, sedangkan pada tahun 2024 target 130 dan realisasi 112. Walaupun terdapat peningkatan dari tahun ke tahun, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa target belum terpenuhi secara optimal (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, 2024).

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Ekspor Non-Migas Kab Bojonegoro Tahun 2021–2024

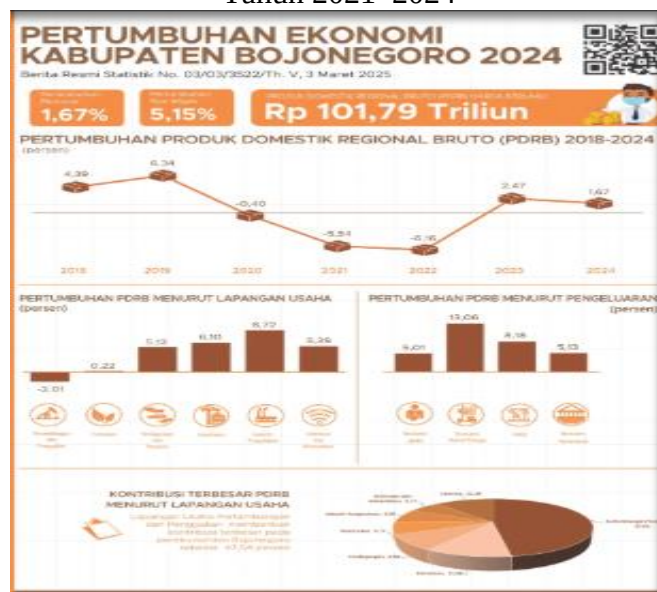
Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Keterangan
2021	100	82	-18	Belum tercapai
2022	110	91	-19	Belum tercapai

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Keterangan
2023	120	103	-17	Belum tercapai
2024	130	112	-18	Belum tercapai

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, diolah peneliti.

Kondisi capaian yang belum optimal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan promosi ekspor dan kerja sama masih menghadapi hambatan yang perlu dievaluasi secara mendalam. Salah satu hambatan yang menonjol adalah keterbatasan anggaran promosi. Dalam pelaksanaan program pemerintah, anggaran merupakan faktor penting yang menentukan luas dan intensitas kegiatan yang dapat dilakukan. Jika anggaran promosi terbatas, maka kegiatan seperti pameran, business matching, pendampingan, dan promosi pasar tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan.

Gambar 1.1
Perbandingan Target dan Realisasi Ekspor Non-Migas Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2021–2024



Sumber : BPS Statistik 2024

Ketergantungan ekonomi Kabupaten Bojonegoro terhadap sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas), khususnya melalui aktivitas eksploitasi di Blok Cepu, menempatkan daerah ini pada posisi yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan ancaman habisnya sumber daya alam yang tidak terbarukan (*depleting resources*). Menyadari risiko makroekonomi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah menginstruksikan urgensi diversifikasi ekonomi secara radikal menuju sektor non-migas. Sektor non-migas, khususnya yang dimotori oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis komoditas lokal, dinilai memiliki resiliensi yang lebih tinggi serta mampu menyerap tenaga kerja secara masif langsung di tingkat akar rumput.

Meskipun Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi komoditas non-migas yang besar (seperti kerajinan kayu jati Kedewan, batik Jonegoran, dan olahan makanan Ledre Padangan), data empiris menunjukkan adanya jurang pemisah (*gap*) yang melebar antara target perencanaan daerah dan realisasi di lapangan.

Berikut adalah data perkembangan target dan realisasi nilai ekspor non-migas Kabupaten Bojonegoro selama empat tahun terakhir:

Tabel 1.2: Target Renja vs Realisasi LAKIP Nilai Ekspor Non-Migas Kabupaten Bojonegoro (2021–2024)

Tahun	Target Renja (USD)	Realisasi LAKIP (USD)	Selisih / Defisit (USD)	Persentase Capaian (%)	Keterangan
2021	25.000.000	22.400.000	-2.600.000	89,60%	Tidak Tercapai

Tahun	Target Renja (USD)	Realisasi LAKIP (USD)	Selisih / Defisit (USD)	Persentase Capaian (%)	Keterangan
2022	28.500.000	24.100.000	-4.400.000	84,56%	Tidak Tercapai
2023	32.000.000	26.800.000	-5.200.000	83,75%	Tidak Tercapai
2024	36.500.000	28.300.000	-8.200.000	77,53%	Sangat Rendah

Sumber: Data Sekunder Diolah dari Dokumen Renja dan LAKIP/LKjIP Dinas Perdagangan Kab. Bojonegoro (2021–2024).

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa persentase capaian ekspor non-migas Kabupaten Bojonegoro mengalami kemerosotan yang konsisten. Pada tahun 2021, tingkat capaian berada di angka 89,60% dengan selisih defisit sebesar USD 2,6 Juta. Kondisi ini semakin memburuk pada tahun 2024, di mana capaian merosot menjadi 77,53% dengan selisih negatif membengkak hingga **USD 8,2 Juta**.

Tidak tercapainya target kinerja ini dipicu oleh dua faktor utama:

1. Rendahnya Akurasi Data (*Under-Reported Data*): Sebagian besar transaksi ekspor UMKM Bojonegoro dilakukan melalui pihak ketiga (*agregator/tengkulak ekspor*) yang berbasis di Surabaya atau Jakarta. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) terbit atas nama perusahaan agregator luar daerah tersebut. Akibatnya, nilai transaksi ekspor bernilai miliaran rupiah tersebut secara administratif tidak tercatat sebagai pencatatan ekspor Kabupaten Bojonegoro.
2. Alur Bimtek yang Belum Menyentuh Sektor Hulu: Program Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dijalankan Dinas Perdagangan masih berfokus pada kegiatan

pameran (hilir) dan abai pada pendampingan legalitas/sertifikasi ekspor di sektor hulu.

Tabel 1.3: Kepemilikan Legalitas dan Sertifikasi Ekspor UMKM Binaan Bojonegoro (Tahun 2024)

Jenis Klasifikasi Industri	Total UMKM Binaan	Memiliki NIB Eksporthir	Memiliki Sertifikasi Internasional (SVLK / HACCP / Eco)	Mampu Ekspor Mandiri
Kerajinan Kayu Jati	145 Unit	12 Unit (8,2%)	5 Unit SVLK (3,4%)	3 Unit (2,0%)
Pangan Olahan (Ledre)	88 Unit	6 Unit (6,8%)	2 Unit HACCP (2,2%)	1 Unit (1,1%)
Batik Jonegoran	62 Unit	4 Unit (6,4%)	0 Unit Eco-Label (0%)	0 Unit (0%)
TOTAL	295 Unit	22 Unit (7,4%)	7 Unit (2,3%)	4 Unit (1,3%)

Sumber: Data Sekunder Diolah dari Bidang Promosi Ekspor Disdagkop UM Kab. Bojonegoro, 2025.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari 295 UMKM potensial, hanya **2,3%** yang memiliki sertifikasi standar ekspor internasional dan hanya **1,3%** yang mampu melakukan ekspor secara mandiri.

Untuk mengurai kompleksitas permasalahan tersebut secara sistematis, penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kinerja Sektor Publik dari Mahmudi (2019) melalui empat dimensi Rantai Nilai Kinerja (*Performance Value Chain*):

1. Dimensi *Input*: Menilai kecukupan SDM aparatur dan alokasi anggaran operasional pada Renja.
2. Dimensi *Process*: Menilai alur Bimbingan Teknis (Bimtek) ekspor dan Akurasi Data pelaporan transaksi ekspor.
3. Dimensi *Output*: Menilai capaian fisik seperti jumlah pameran dagang dan dokumen MoU kerja sama.
4. Dimensi *Outcome*: Menilai dampak riil berupa capaian nilai ekspor daerah pada LAKIP/LKjIP dan kemandirian ekspor UMKM.

Kabupaten Bojonegoro pada dasarnya memiliki kekayaan lanskap geografis dan budaya yang melahirkan berbagai produk unggulan dengan nilai komparatif dan kompetitif tinggi yang sangat potensial untuk menembus pasar internasional. Komoditas unggulan non-migas tersebut terbagi ke dalam beberapa klaster industri kreatif, manufaktur padat karya, dan agrokomoditas spesifik, antara lain :

1. Kerajinan Bubut dan Ukir Kayu Jati (Sentra Industri Kedewan dan Kasiman) :
Memanfaatkan tegakan hutan jati yang melimpah di kawasan Bojonegoro bagian barat, para perajin di Kecamatan Kedewan dan Kasiman telah berhasil mengubah limbah akar (*bonggol*) dan kayu jati menjadi produk kerajinan bubut, furnitur premium, dan dekorasi rumah (*home decor*) bernilai estetika tinggi. Keunggulan komoditas ini terletak pada serat kayu jati lokal yang padat, eksotis, dan tahan lama. Produk dari sentra Kedewan ini secara historis telah menarik minat pasar Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur. Namun, potensinya terhambat oleh rigidnya regulasi sertifikasi kelestarian kayu

(SVKLLK) serta rantai pasok ekspor yang masih bergantung pada eksportir perantara di luar daerah.

2. Batik Jonegoran (Sentra Industri Kecamatan Kapas, Balen, dan Bojonegoro Kota) :

Sebagai representasi identitas kultural daerah, Batik Jonegoran memiliki karakteristik motif kontemporer unik yang mengangkat kearifan lokal dan kekayaan alam Bojonegoro, seperti motif *Sapi Ongole*, *Sekar Jati*, *Rengkek*, *Gringsing*, dan *Mliwis Putih*. Sentra kerajinan batik yang tersebar di Kecamatan Kapas dan Balen ini tidak hanya melayani pasar domestik, melainkan mulai dilirik oleh pasar regional Asia Tenggara. Pengembangannya ke pasar global memerlukan standardisasi mutu pewarnaan ramah lingkungan (*eco-labeling*) serta peningkatan skala produksi dari industri rumahan menjadi industri manufaktur skala menengah.

3. Ledre Bojonegoro (Sentra Industri Kecamatan Padangan) :

Ledre merupakan produk pangan olahan tradisional legendaris khas Bojonegoro berbahan dasar pisang raja, tepung beras, dan santan yang menghasilkan tekstur renyah dengan aroma khas. Berpusat di Kecamatan Padangan, industri ledre dijalankan secara turun-temurun melalui metode *home industry*. Komoditas ini memiliki peluang ekspor yang besar untuk mengisi ceruk pasar makanan ringan (*snack*) internasional, khususnya di negara-negara dengan komunitas diaspora Indonesia yang besar. Hambatan utama komoditas ini di sektor ekspor adalah keterbatasan masa kedaluwarsa (*shelf-life*), kemasan yang belum berstandar ekspor, serta belum terpenuhinya sertifikasi keamanan pangan internasional seperti *HACCP* (*Hazard Analysis Critical Control Point*).

4. Sapi Peranakan Ongole / PO (Sentra Peternakan Kecamatan Tambakrejo dan Napis) :

Di sektor agro-peternakan, Bojonegoro dikenal sebagai salah satu lumbung terbesar Sapi Peranakan Ongole (PO) di Jawa Timur. Berpusat di kawasan perdesaan seperti Kecamatan Tambakrejo dan kawasan Napis (Kecamatan Tambakrejo), sapi PO Bojonegoro memiliki keunggulan fisik yang kuat, tahan penyakit, dan kualitas karkas daging yang tinggi. Komoditas ini sangat potensial dikembangkan menjadi produk olahan daging steril atau ekspor hewan ternak hidup ke negara-negara Asia. Kendati demikian, ketatnya regulasi karantina internasional dan isu sanitasi sering kali menjadi tembok besar bagi Bidang Promosi Ekspor dalam memetakan jalan keluar bagi komoditas peternakan ini.

Keberadaan komoditas-komoditas potensial di atas seharusnya menjadi modal dasar yang kuat bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, khususnya Bidang Promosi Ekspor dan Kerjasama, untuk mendongkrak neraca perdagangan daerah. Namun pada realitasnya, kinerja makro perdagangan ekspor non-migas Bojonegoro belum mencerminkan potensi riil tersebut. Fluktuasi ketidakcapaian target perencanaan dapat dilihat secara jelas pada tabel dan grafik di bawah ini :

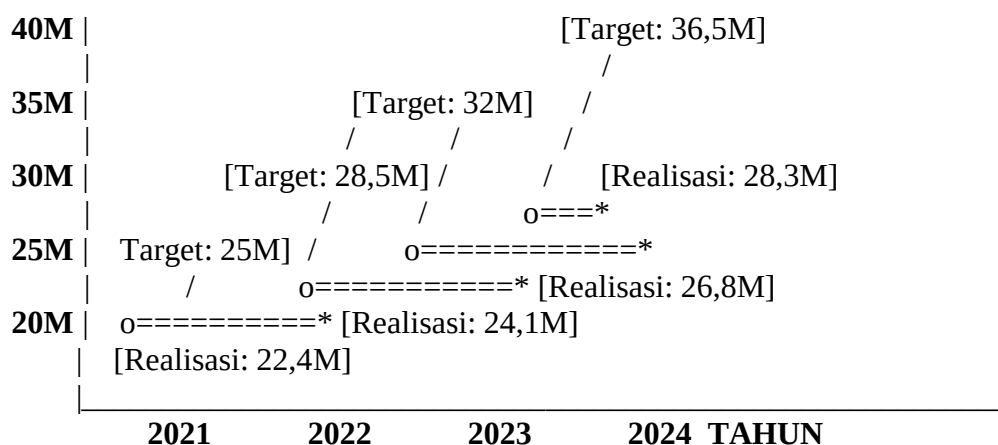
Tabel 1.3
Target dan Realisasi Nilai Ekspor Non-Migas Kabupaten Bojonegoro Tahun
2021–2024 (Dalam USD)

Tahun	Target Nilai Ekspor (USD)	Realisasi Nilai Ekspor (USD)	Selisih / Varians (USD)	Capaian Kinerja (%)
2021	25.000.000	22.400.000	-2.600.000	89,60%
2022	28.500.000	24.100.000	-4.400.000	84,56%
2023	32.000.000	26.800.000	-5.200.000	83,75%
2024	36.500.000	28.300.000	-8.200.000	77,53%

Sumber: Data Sekunder Diolah dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, 2025.

Untuk memberikan gambaran visual yang komprehensif mengenai kesenjangan (*gap*) antara proyeksi perencanaan pembangunan daerah dengan realisasi faktual di lapangan, berikut disajikan grafik fluktuasi nilai ekspor non-migas Kabupaten Bojonegoro :

Gambar 1.1
Grafik Fluktuasi Target dan Realisasi Nilai Ekspor Non-Migas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2024



Keterangan :

(---o) Garis Target Nilai Ekspor Non-Migas

(====*) Garis Realisasi Nilai Ekspor Non-Migas

Sumber: Data Tabel 1.1 diolah dalam bentuk Grafik Garis Kontras, 2026.

Berdasarkan visualisasi Gambar 1.1 di atas, terlihat secara benderang adanya tren yang mengkhawatirkan (*alarming trend*) dalam tata kelola perdagangan luar negeri Kabupaten Bojonegoro. Garis tren Target Nilai Ekspor (garis atas) terus bergerak naik secara progresif dari tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan optimisme tinggi dari perencana kebijakan daerah dalam merespons pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Sebaliknya, Garis Tren Realisasi Nilai Ekspor (garis bawah) bergerak secara stagnan dan lambat, sehingga menciptakan celah (*gap*) yang semakin melebar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, *gap* ketidakcapaian target berada di angka USD 2,6 Juta, namun pada akhir tahun pengamatan (2024), angka defisit pencapaian tersebut melonjak tajam hingga menyentuh angka USD 8,2 Juta dengan persentase capaian terendah sebesar 77,53%.

Fenomena melebarnya jarak antara target dan realisasi pada Gambar 1.1 mengindikasikan adanya disfungsi manajemen kinerja pada instansi vertikal yang bertanggung jawab. Ketidakmampuan daerah dalam mengeksekusi target ekspor ini tidak dapat semata-mata dituduhkan pada dinamika pasar global, melainkan memerlukan investigasi mendalam dari kacamata administrasi publik mengenai efektivitas organisasi. Kegagalan ini menjadi indikasi awal adanya persoalan struktural, manajerial, dan operasional pada institusi pengampu kebijakan, khususnya pada Bidang Promosi Ekspor dan Kerjasama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

Oleh karena itu, evaluasi kinerja secara holistik dengan membedah aspek *Input* (masukan sumber daya), *Process* (proses birokrasi dan pelaksanaan SOP), *Output* (luaran konkret kebijakan), hingga *Outcome* (dampak nyata bagi pelaku

UMKM) menjadi sebuah urgensi akademis dan praktis. Melalui kerangka analisis rantai nilai kinerja (*performance value chain*) sektor publik, penelitian ini diarahkan untuk menyingkap akar masalah di balik anomali kontras antara melimpahnya potensi komoditas lokal Bojonegoro dengan rendahnya realisasi capaian ekspor riil daerah.

Hambatan berikutnya adalah belum optimalnya pelaporan dari eksportir kepada dinas. Pelaporan yang tidak tertib menyebabkan data yang dimiliki pemerintah daerah menjadi tidak lengkap dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Padahal, data merupakan dasar utama dalam penyusunan kebijakan publik. Jika data tidak akurat, maka pemerintah akan kesulitan menentukan prioritas program, mengevaluasi capaian, dan merumuskan strategi perbaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antara dinas dan pelaku usaha masih perlu diperkuat (Dunn, 2018).

Masalah lain yang juga penting adalah masih adanya UMKM yang belum memenuhi legalitas usaha. Legalitas merupakan syarat penting dalam pengembangan usaha karena berkaitan dengan keabsahan usaha, kepercayaan pasar, dan kemampuan pelaku usaha untuk mengikuti berbagai program fasilitasi pemerintah. Namun pada kenyataannya, belum semua UMKM di Kabupaten Bojonegoro memiliki dokumen legal yang lengkap. Hal ini menjadi hambatan karena tanpa legalitas yang memadai, UMKM akan sulit masuk ke dalam program-program yang mensyaratkan standar administratif tertentu. [

Selain itu, permasalahan yang perlu dicermati adalah belum optimalnya capaian kegiatan dibanding target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Setiap perangkat daerah memiliki sasaran dan target

pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD. Target tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar arah pembangunan daerah tetap terukur. Jika capaian belum sesuai dengan target, maka itu menunjukkan masih adanya hambatan dalam proses pelaksanaan program. Hambatan tersebut dapat berasal dari keterbatasan sumber daya, kelemahan koordinasi, rendahnya partisipasi pelaku usaha, maupun belum efektifnya strategi pelaksanaan program (Riant Nugroho, 2021).

Dengan kondisi tersebut, penelitian mengenai evaluasi kinerja Bidang Promosi Ekspor dan Kerjasama pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana kinerja bidang tersebut dalam mendukung promosi ekspor dan pengembangan , apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana upaya perbaikannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian evaluasi kinerja sektor publik, sekaligus manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program promosi ekspor dan pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, peneliti tertarik melakukan kajian ilmiah mendalam dengan judul : " ***Evaluasi Promosi Ekspor Dan Kerjasama Di Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro*** "

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diketahui bahwa Bidang Promosi Ekspor dan Kerjasama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan

ekspor non-migas dan meningkatkan daya saing produk lokal. Namun, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tersebut yang menyebabkan capaian target belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja bidang tersebut secara lebih mendalam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah evaluasi kinerja Bidang Promosi Ekspor dan Kerjasama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari aspek input, process, output, dan outcome?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kinerja Bidang Promosi Ekspor dan Kerjasama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari aspek input, process, output, dan outcome, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah.
2. Menambah referensi ilmiah mengenai penerapan teori evaluasi kinerja sektor publik dalam konteks pemerintahan daerah.
3. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kinerja perangkat daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Bidang Promosi Ekspor dan Kerjasama .
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait pengembangan ekspor dan UMKM.
3. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran pemerintah daerah dalam mendukung promosi produk dan pengembangan usaha.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan kajian sejenis pada objek dan lokasi yang berbeda.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam usulan penelitian ini mengikuti struktur skripsi sesuai Buku Pedoman Penulisan Skripsi FISIP Universitas Bojonegoro yang terdiri dari lima bab utama sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama berisi pengantar utama penelitian yang mencakup :

Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi bagian awal yang menjelaskan alasan dipilihnya topik penelitian, fenomena yang melatarbelakanginya, rumusan permasalahan yang akan dikaji, serta manfaat teoritis dan praktis dari penelitian yang dilakukan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka menguraikan landasan teori dan kajian empiris, terdiri dari :

Berisi penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka konseptual. Bab ini menjelaskan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai dasar perbandingan, kemudian menguraikan teori evaluasi kinerja sektor publik, pengembangan ekonomi lokal, promosi ekspor, dan kerjasama yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. Bab ini juga memuat hubungan antarvariabel yang menjadi dasar pemikiran peneliti dalam memahami objek penelitian.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menjelaskan teknis pelaksanaan penelitian secara rinci sesuai format kualitatif Buku Pedoman :

Memuat jenis penelitian, fokus penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. Bab ini menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian akan dilaksanakan, mulai dari pendekatan yang digunakan, siapa saja yang menjadi sumber informasi, teknik yang dipakai untuk memperoleh data, hingga cara menganalisis data agar diperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan analisisnya :

Berisi gambaran umum objek penelitian, penyajian data hasil penelitian, serta analisis dan interpretasi data berdasarkan fokus penelitian. Bab ini

membahas temuan yang diperoleh di lapangan secara mendalam dengan mengaitkannya pada teori yang digunakan, sehingga dapat diketahui bagaimana kondisi sebenarnya dari kinerja Bidang Promosi Ekspor dan Kerjasama .

5. BAB V : PENUTUP

Bab kelima berisi sintesis hasil penelitian :

- a) Kesimpulan : Jawaban konkret terhadap rumusan masalah berupa evaluasi kinerja Bidang Promosi Ekspor, temuan utama dari empat dimensi analisis, dan faktor-faktor kunci yang memengaruhi pencapaian target.
- b) Saran : Rekomendasi operasional dan strategis untuk Dinas Perdagangan berupa perbaikan SDM, penguatan koordinasi, optimalisasi anggaran, inovasi program promosi, dan penguatan UMKM.

Bagian Penutup Skripsi

Selain lima bab tersebut, proposal ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran yang mendukung kelengkapan administrasi dan substansi penelitian. Daftar pustaka memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan proposal, sedangkan lampiran berisi dokumen pendukung seperti pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen penelitian lainnya.